

PERAN SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

ISKI LIGA NURAK

NPM : 92011403161015



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO

2024

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Kewenangan	5
B. Pengertian Peran.....	9
C. Pengertian Kejaksaan	12
D. Pengertian Tindak Pidana Khusus	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah	20
B. Sumber-Sumber Penelitian	20
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum	21
D. Metode Analisis Masalah.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Seksi Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan	23
B. Seksi Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Khusus	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

Iski Liga Nurak. NPM : 92011403161015. Peran Seksi Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus. Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Jamal Tubagus.

Kata Kunci: Peran Seksi Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar negara tahun 1945. Lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari insitusi negara yang bertanggung jawab atas penuntutan pelanggaran hukum, perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam kewenangannya lembaga kejaksaan mempunyai seksi bidang salah satunya seksi tindak pidana khusus yang bertanggung jawab dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara pidana khusus

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah peran seksi tindak pidana khusus di kejaksaan? 2. Bagaimanakah seksi tindak pidana khusus di kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus?

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach*.

Dalam penanganan perkara dikategorikan sebagai delik khusus, seksi tindak pidana khusus dalam lembaga kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan suatu kasus seperti pada tindak pidana korupsi, dan juga proses hukum lainnya di pengadilan dalam beberapa kasus yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan, tindak pidana terorisme, perkara pelanggaran HAM yang berat serta juga beberapa peran lainnya yang dilakukan seksi tindak pidana khusus. Dari segi organisasi seksi tindak pidana khusus dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dalam tugas dan fungsinya melakukan proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan upaya hukum dan eksekusi, serta juga koordinasi dengan lembaga lain terhadap kasus-kasus yang memiliki penanganan secara khusus dan sangat kompleks dan juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat.

ABSTRACT



Iski Liga Nurak. NPM: 92011403161015. **The Role of the Special Crimes Section in the Prosecutor's Office in Special Crime Cases.** Supervised by Yusran Maaroeff and Jamal Tubagus.

Keywords: The Role of the Special Crimes Section in the Prosecutor's Office

Republic of Indonesia is a country of law based on Pancasila and the 1945 Constitution. The prosecutor's office is part of a state institution that is responsible for prosecuting violations of the law, protecting the interests of the state and society, and maintaining security and order. Within its authority, the prosecutor's office has a section, one of which is the special crimes section which is responsible for increasing the effectiveness and efficiency of handling special criminal cases. The formulation of the problem in this study is: 1. What is the role of the special crimes section in the prosecutor's office? 2. How is the special crimes section in the prosecutor's office in handling special criminal cases? This research method uses normative legal research, the approach used in this study is the statute approach or legislative approach and conceptual approach. The special crime section in the prosecutor's office has a very important role in handling a special case such as corruption, money laundering, tax crimes, terrorism, serious human rights violations and other roles carried out by the special crime section. In terms of the organization, the special crime section in handling special crime cases in its duties and functions carries out the process of investigation, investigation, pre-prosecution, prosecution, and legal efforts and execution, as well as coordination with other institutions regarding cases that have a major impact on life in the community.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Syarat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerataan kepolisian merupakan salah satu prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan publik. Badan Pemeriksa Negara Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang kedudukannya berkaitan dengan kekuasaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kejaksaan dalam sebuah lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan di suatu Negara. Secara hukum, kejaksaan merupakan bagian dari insitusi penegak hukum yang bertanggung jawab atas penuntut pelanggaran hukum, perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kejaksaan memiliki otoritas dan wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mengawasi pelaksanaan hukum dalam suatu Negara. Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Kejaksaan memainkan berperan yang penting dalam menjaga keadilan dan menegakan hukum. Mereka bertindak secara independen, objektif, dan professional

dalam menjalankan tugasnya. Kejaksaan juga memiliki hak-hak individu, menjamin perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan dengan benar. Secara keseluruhan bahwa kejaksaan merupakan pilar penting dalam sistem peradilan suatu negara, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, perlindungan kepentingan negara dan juga masyarakat, serta pencegahan pelanggaran hukum.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga kejaksaan mempunyai beberapa seksi bidang salah satunya seksi tindak pidana khusus. Seksi tindak pidana khusus dalam kejaksaan memiliki tugas yang penting dalam menangani kasus tindak pidana khusus yang memiliki kompleksitas atau sifat yang membutuhkan penanganan secara khusus. Seksi tindak pidana khusus dalam kejaksaan berperan sangat vital dalam menangani kasus tindak pidana khusus terkait pengaturan, koordinasi, dan strategi yang digunakan dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Maraknya kasus kejahatan di Indonesia dalam berbagai aspek salah satunya dalam konteks kasus tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus memiliki elemen unik dan memerlukan perlakuan hukum yang khusus. Kasus Tindak pidana khusus merujuk pada sebuah kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, dan juga berbagai macam kejahatan tindak pidana khusus lainnya.

Dalam konteks ini, perlunya pemahaman mendalam mengenai peran dari seksi tindak pidana khusus dalam menangani perkara tindak pidana khusus menjadi

sangat penting dalam proses penyelidikan dan penuntutan serta kerja sama dengan lembaga keamanan lainnya.

Seksi tindak pidana khusus sebagai salah satu unit di Kejaksaan yang diberikan kewenangan oleh lembaga Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana khusus yang memiliki kompleksitas atau sifat yang membutuhkan penanganan secara khusus. Dalam konteks global tantangan terkait penanganan tindak pidana khusus semakin kompleks dan memerlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Seksi pidana khusus di Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus tindak pidana tertentu untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam bidang-bidangnya.

Peran seksi tindak pidana khusus juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap tindak pidana khusus. Dengan berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai tantangan dan hambatan baru, sehingga Seksi pidana khusus diuntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapabilitasnya sebagai unit yang diberikan kewenangan oleh lembaga Kejaksaan.

Penelitian mengenai peran seksi pidana khusus dalam Kejaksaan dapat menjadi landasan untuk reformasi kebijakan dan praktik penegak hukum yang lebih efektif. Melalui pemahaman mendalam terhadap peran seksi tindak pidana khusus, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana khusus. Sehingga dapat tercapai suatu hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itulah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Peran Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus**”

B.Rumusan Masalah

1. Apakah Peran seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan ?
2. Bagaimanakah seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dari seksi tindak pidana khusus di lembaga kejaksaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana seksi tindak pidana khusus dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di lembaga kejaksaan.

D.Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dalam bidang hukum serta sebagai referensi bagi praktisi hukum, dosen, pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan mengenai kewenangan lembaga kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana khusus.
2. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu menjadi salah satu pedoman mengenai bagaimana peran dari seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
3. Hasil penelitian Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aziz Syamsudin, 2017, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafik, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, 2021, Petunjuk Teknis dan Surat Edaran,
Kejaksaan Tinggi, Jakarta.

Joko Sriwidodo, 2019, Kajian Hukum Indonesia Teori dan Praktek, Kepel
Press, Jakarta

Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Kasih, Jakarta.

Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dalam Perspektif
Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Miriam Budiarjo, 1999, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

Muhamad Yamin, 2012, Tindak pidana khusus, Cv Pustaka Setia, Bandung

Nandang Almansah, 2017, Teori dan Praktek Kewenangan, Pandiva Buku,
Yogyakarta

Oksidelfa Yanto, 2020, Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan
Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta,
Bandung.

Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar
KUHP, Prenadamedia Groub, Jakarta.

R. Soeroso, 2010, Hukum Acara Khusus “Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-undang”, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER017/A/JA/07/2014 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

JURNAL:

Fadhlin Ade Candra, Februari 2021, Peran Penegakan Hukum Dalam Penegakan
Hukum Indonesia Vol.1 No.1

Gerald Makagiarsar, September 2017. Kewenangan kejaksaan dalam Melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus.Fakultas
Hukum Unsrat: Jurnal Elektronik Bagian
Hukum Vol. 6 No.7

INTERNET:

https://id.Wikipedia.org/Wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia/

<https://WWW.Kejaksaan.go.id/dominus-litis/>

[https://jdih.Kejaksaan.go.id/Produk Hukum](https://jdih.Kejaksaan.go.id/Produk_Hukum)